



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN POLITIK: STUDI PADA DPD PAN JEMBER

Badrul Falah Al-Baihaqy¹, M. Hamdi HS²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ³Universitas Muhammadiyah Jember

hamdi.hs@unmuhjember.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June, 2025

Revised June, 2025

Accepted June, 2025

Available online June, 2025

qiqiboyan@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Partai politik mempunyai peran yang strategis dalam demokrasi yaitu sebagai agen rekrutmen kader politik yang berorientasi pada keterbukaan dan meritokrasi. Namun, dalam praktik yang ditemukan di lapangan proses rekrutmen tersebut kerap kali menghadapi kendala baik struktural maupun kultural seperti sosialisasi yang minim serta belum terbangunnya sistem kaderisasi berkelanjutan. Penelitian ini tujuannya mengkaji implementasi strategi rekrutmen politik oleh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Jember dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pendekatan penelitian yang digunakan melalui kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAN Kabupaten Jember sudah memadukan pendekatan digital melalui aplikasi SimPAN dengan strategi sosialisasi secara terbuka pada masyarakat, walaupun demikian proses rekrutmen masih dihadapkan pada tantangan persepsi keagamaan dan lemahnya pelatihan kader secara sistematis. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan terhadap sistem meritokrasi, transparansi dan meningkatkan pendidikan politik berbasis komunitas dengan tujuan mewujudkan kader berkualitas.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik; Kaderisasi, Demokrasi Lokal

ABSTRACT

Political parties have a strategic role in democracy, namely as agents for recruiting political cadres who are oriented towards openness and meritocracy. However, in practice found in the field, the recruitment process often faces both structural and cultural obstacles such as minimal socialization and the lack of a sustainable cadre system. This study aims to examine the implementation of political recruitment strategies by the DPD of the National Mandate Party (PAN) of Jember Regency in carrying out the mandate of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. The research approach used was qualitative descriptive through observation, interview and documentation data collection techniques. The results of the study show that PAN Jember Regency has combined a digital approach through the SimPAN application with an open socialization strategy to the community, however, the recruitment process is still faced with challenges of religious perceptions and weak systematic cadre training. The recommendations given include strengthening the meritocracy system, transparency and improving community-based political education with the aim of creating quality cadres.

Keyword: Political Recruitment; Cadre Formation, Local Democracy

1. PENDAHULUAN

Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, artinya membutuhkan partisipasi aktif warga negara untuk menjadi elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan negara hukum yang adil. Salah satu bentuk partisipasi aktif dari masyarakat tersebut yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, yang tidak hanya sebagai sarana pergantian kekuasaan, namun juga sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan negara (Nuraini, dkk., 2019). Nilai demokrasi di Indonesia dijamin melalui keberadaan konstitusi yang selanjutnya diwujudkan dalam berbagai instrumen politik sehingga memungkinkan rakyat berkontribusi secara langsung terhadap proses pembuatan kebijakan publik.

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com

Partai politik mempunyai posisi sentral di dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan menjadi penghubung antara kepentingan rakyatnya dengan penyelenggara negara. Keberadaan partai politik bukan hanya memiliki tujuan untuk memenangkan kekuasaan dalam pemilu, namun juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penting seperti halnya pendidikan politik, menyusun kebijakan, artikulasi kepentingan, serta melakukan rekrutmen kader berkualitas dan berdedikasi (Khamim & Sabri, 2019). Regenerasi kepemimpinan merupakan salah satu fungsi vital partai politik dikarenakan berhubungan dengan keterlibatan publik dalam struktur pemerintahan yang bisa dilakukan melalui proses rekrutmen. Proses dalam regenerasi kepemimpinan ini menjadi penentu bagi mereka yang akan mewakili masyarakat dalam parlemen maupun posisi strategis lainnya, sehingga penting untuk dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, serta berbasis kompetensi. Namun yang terjadi di lapangan dalam praktiknya masih terdapat partai yang belum melaksanakan fungsi rekrutmen ini secara maksimal (Giawa & Daya Rini, 2017).

Sebagai negara hukum yang menjamin demokrasi, Indonesia telah mengatur keberadaan dan fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa partai politik harus menjalankan fungsinya termasuk sebagai sarana rekrutmen jabatan politik secara demokratis, dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (Amilia & Anggraeni, 2019). Implementasi dari aturan tersebut masih kerap mengalami kendala di lapangan, terutama dari segi konteks lokal yang didalamnya struktur dan sumber daya partai politik tidak selalu memadai. Selain itu, proses rekrutmen sering kali tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga berdampak pada minimnya partisipasi dan rendahnya kualitas kader yang direkrut. Situasi yang demikian tentu membutuhkan perhatian serius agar fungsi dari partai politik sebagai pilar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar dijalankan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Rekrutmen politik yang ideal seharusnya berorientasi pada meritokrasi dan keterbukaan, bukan hanya mengedepankan kepentingan jangka pendek atau kedekatan emosional dengan elite partai. Strategi rekrutmen harus memperhatikan latar belakang, kompetensi, serta integritas individu yang direkrut agar mampu menjalankan tugas-tugas politik secara profesional. Partai politik perlu membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan, mulai dari level bawah hingga pusat yang tujuannya guna menciptakan regenerasi kepemimpinan yang sehat (Syamsiyatun, 2016). Hal tersebut sangat diperlukan demi menjaga keberlangsungan organisasi politik serta memperkuat legitimasi partai di mata publik. Manakala proses rekrutmen tidak dirancang dengan serius, hal yang akan terjadi yaitu partai politik akan kesulitan memenuhi harapan masyarakat dalam menghasilkan para pemimpin yang kapabel dan berintegritas.

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia juga tidak lepas dari tuntutan dalam menjalankan proses rekrutmen politik secara sistematis dan demokratis. PAN dikenal memiliki basis ideologis yang kuat serta lahir dari semangat reformasi, sehingga diharapkan mampu menjadi teladan dalam hal kaderisasi dan partisipasi politik (Tompodung & Tumanduk, 2022). Berkaca dalam konteks lokal seperti Kabupaten Jember, PAN menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan penerapan strategi rekrutmen yang efektif. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses rekrutmen masih cenderung terbatas pada lingkungan tertentu, sehingga belum menyentuh potensi kader dari berbagai latar belakang sosial. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit basis dukungan partai dan mengurangi kualitas rekrutmen politik secara keseluruhan.

Selain keterbatasan akses informasi politik di daerah pedesaan, identifikasi awal menunjukkan adanya pengaruh kedekatan PAN dengan organisasi keagamaan tertentu yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap inklusivitas partai tersebut. Masyarakat yang tidak mempunyai hubungan ideologis atau emosional dengan organisasi tersebut menjadi enggan tertarik untuk bergabung atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan partai. Menurut Giawa & Daya (2017), rendahnya literasi politik juga menjadi faktor penting yang menghambat proses rekrutmen secara terbuka dan kompetitif. Banyak masyarakat khususnya di wilayah pinggiran yang belum memahami fungsi partai politik dan mekanisme rekrutmen yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif Undang-Undang Partai Politik dengan praktik faktual di lapangan.

Permasalahan dalam rekrutmen politik menjadi semakin kompleks saat tidak ada sistem baku yang dijalankan secara konsisten oleh DPD PAN Kabupaten Jember. Tidak adanya panduan dan strategi yang terarah membuat proses pencarian dan pengembangan kader menjadi tidak efektif dan berisiko mengarah pada praktik politik transaksional atau keuangan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang inklusif dan meritokratis. Oleh karena itu, perlu adanya suatu evaluasi secara menyeluruh terhadap strategi yang telah diterapkan selama ini termasuk didalamnya faktor pendukung dan penghambatnya. Upaya demikian bukan hanya penting demi menjaga keberlangsungan partai, namun juga berguna dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian ini diimplementasikan untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengkaji strategi implementasi Undang-Undang Partai Politik dalam konteks rekrutmen kader oleh DPD PAN Kabupaten Jember. Riset ini tidak hanya mengungkap praktik rekrutmen yang berjalan, tetapi juga akan menganalisis hambatan struktural dan kultural yang dihadapi partai dalam menjalankan fungsi rekrutmennya. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi PAN maupun partai lain dalam membangun sistem rekrutmen yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang politik lokal dan partisipasi demokratis dikarenakan minimnya riset yang mengangkat persoalan rekrutmen politik di daerah lokal.

2. METODE

Riset ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya guna memberikan pemahaman terkait strategi dalam menerapkan Undang-Undang Partai Politik dalam proses rekrutmen politik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Jember. Menurut (Nasution, 2020), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian dalam konteks sosial. Pemilihan pendekatan ini untuk menggali secara mendalam makna, praktik, serta dinamika sosial yang terjadi dalam konteks organisasi politik secara alamiah. Penelitian kualitatif membantu penulis untuk mendeskripsikan strategi implementasi undang-undang partai politik dalam rekrutmen politik oleh PAN di Kabupaten Jember serta faktor penghubung dan penghambatnya.

Sumber Data

Sumber data yang diimplementasikan dalam riset ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung melalui aktivitas observasi di lapangan, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi kegiatan partai. Pengamatan dijalankan secara partisipatif maupun non partisipatif terhadap kegiatan internal PAN yang berhubungan dengan proses rekrutmen. Wawancara dilakukan dengan pengurus DPD dan DPC PAN, serta staf administratif yang terlibat langsung dalam manajemen kaderisasi. Sementara itu, dokumentasi meliputi catatan kegiatan, rekaman wawancara, foto, dan dokumen internal partai yang dapat diakses secara terbatas. Data sekunder diperoleh dari studi literature yang diambil baik berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen perundang-undangan, serta arsip berita atau laporan yang sesuai dengan isu rekrutmen politik dan implementasi undang-undang partai politik.

Objek dan Lokasi Penelitian

Desain riset ini bersifat studi kasus yang fokusnya pada satu objek tertentu secara mendalam, yaitu DPD PAN Kabupaten Jember. Objek penelitian dipilih karena merepresentasikan keadaan politik lokal yang khas, serta menghadirkan kompleksitas dalam implementasi fungsi partai politik. Fokus utama penelitian ini adalah strategi rekrutmen politik yang dijalankan partai hubungannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor DPD PAN Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data riset ini dilaksanakan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi. Observasi dilakukan secara non partisipatif artinya penulis mencermati kegiatan politik, pola komunikasi serta dinamika rekrutmen kader tanpa turut campur dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, wawancara semi terstruktur digunakan guna mendapatkan informasi langsung dari informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Informan utama meliputi pengurus inti DPD PAN, pengurus DPC PAN, serta staf administratif yang memiliki pengetahuan mendalam terkait proses rekrutmen. Dokumentasi seperti foto kegiatan, rekaman wawancara, serta dokumen internal partai juga dikumpulkan sebagai pelengkap data dan bahan triangulasi.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman, (2018) yang melibatkan tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, serta menyimpulkan. Reduksi data dilaksanakan melalui seleksi dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan, fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah disaring selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau skema yang membantu visualisasi hubungan antar kategori. Tahapan akhir selanjutnya adalah menyimpulkan, hal yang dilakukan penulis yaitu menafsirkan makna temuan berdasarkan konteks sosial dan kerangka teori yang digunakan. Seluruh

proses ini dilakukan secara interaktif agar menghasilkan pemahaman yang mendalam dan utuh terhadap fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian

Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember

Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam proses rekrutmen politik di DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Jember tercermin melalui dua strategi utama, yaitu pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Aplikasi SimPAN (Sistem Informasi Manajemen Partai Amanat Nasional) menjadi instrumen penting dalam strategi digital. Aplikasi ini menyediakan layanan pendaftaran daring bagi calon anggota yang ingin bergabung dengan PAN secara mandiri, serta menawarkan berbagai fitur seperti verifikasi data, penerbitan kartu tanda anggota digital, akses informasi pelatihan kader, dan forum diskusi internal.

Langkah digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi rekrutmen dan memperluas jangkauan partai, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat di wilayah terpencil. Calon anggota dapat mengakses aplikasi SimPAN melalui situs resmi PAN atau platform digital lainnya, kemudian mengisi data pribadi yang dibutuhkan sebelum diverifikasi oleh sistem. Identitas keanggotaan yang diberikan bersifat digital dan langsung terintegrasi dengan database partai.

Pendekatan langsung kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi politik di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan identitas partai, menyosialisasikan program kerja, serta memberikan edukasi politik yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Strategi ini dianggap sebagai wujud tanggung jawab partai dalam menciptakan masyarakat yang melek politik dan aktif dalam proses demokratis.

Perpaduan antara strategi digital dan sosialisasi langsung menunjukkan adanya adaptasi PAN Kabupaten Jember terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Kedua pendekatan tersebut dinilai mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan kemudahan akses bagi calon anggota. Namun, efektivitas pelaksanaan strategi tersebut sangat bergantung pada kesinambungan program dan konsistensi kader partai di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem evaluasi internal yang kuat guna memastikan bahwa proses rekrutmen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan kader yang memiliki integritas dan komitmen terhadap ideologi partai.

Struktur organisasi DPD PAN Kabupaten Jember turut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proses rekrutmen. Berdasarkan Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/481/VI/2021, susunan kepengurusan terdiri dari Majelis Penasehat, Pengurus Harian, serta berbagai badan pelaksana yang tersebar di enam daerah pemilihan (Dapil). Setiap unit organisasi memiliki peran yang terstruktur dalam mengelola kegiatan rekrutmen, pendidikan politik, dan pembinaan wilayah. Tata kelola organisasi yang sistematis ini memberikan dukungan operasional bagi pelaksanaan strategi rekrutmen secara efektif di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Penerapan prinsip keterbukaan dan demokratisasi oleh PAN Kabupaten Jember sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mengharuskan partai politik melaksanakan rekrutmen secara terbuka dan demokratis. Selain itu, pelaksanaan fungsi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal yang sama juga tercermin dalam berbagai kegiatan partai, seperti pelatihan kader, diskusi politik, dan forum masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan komitmen PAN untuk mencerdaskan pemilih dan meningkatkan kesadaran politik publik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Rekrutmen Politik di PAN Kabupaten Jember

Keberhasilan PAN Kabupaten Jember dalam menerapkan strategi rekrutmen tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Keterbukaan partai terhadap individu dari berbagai latar belakang sosial memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk bergabung. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SimPAN juga menjadi katalisator dalam mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran anggota. Selain itu, semangat kader partai dalam membangun komunikasi dengan masyarakat secara langsung turut memperkuat relasi antara partai dan publik, terutama dalam membangun kepercayaan serta memperluas basis keanggotaan.

Kegiatan sosial, pelatihan kader, dan program pendidikan politik yang dilakukan secara reguler semakin memperkuat posisi PAN sebagai partai yang terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan seperti ini sangat relevan dalam konteks penguatan demokrasi lokal dan peningkatan partisipasi politik masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan kelompok non-partisipan.

Meskipun demikian, proses rekrutmen PAN Kabupaten Jember masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya persepsi publik yang mengaitkan PAN secara eksklusif dengan organisasi Muhammadiyah. Asosiasi ini menimbulkan kesan bahwa partai lebih mengutamakan kader dari latar belakang tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat kelompok masyarakat lainnya untuk bergabung. Kondisi ini menghambat terwujudnya keanggotaan yang beragam serta membatasi perluasan pengaruh partai di masyarakat yang lebih heterogen.

Pembangunan narasi politik yang inklusif dan komunikasi publik yang efektif menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat guna mengatasi hambatan tersebut. PAN Kabupaten Jember harus terus menunjukkan bahwa rekrutmen terbuka tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga diwujudkan dalam praktik organisasi yang mencerminkan keberagaman dan persamaan hak bagi semua kalangan. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Partai Politik dapat berjalan secara optimal dan mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Pembahasan

Upaya dari penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkhusus pasal 29 ayat (1) dan (2), tegas mengatakan bahwa partai politik diharuskan melakukan rekrutmen politik dengan demokratis, terbuka, dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan lapangan PAN Kabupaten Jember telah berusaha melakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut, salah satunya diwujudkan melalui penerapan aplikasi SimPAN (Sistem Informasi Manajemen Partai Amanat Nasional). Aplikasi SimPAN merupakan sarana digital yang memudahkan proses perekrutan anggota baru yang diharapkan secara efisien, sistematis dan transparan. Berdasarkan pengamatan, menunjukan bahwa PAN Kabupaten Jember menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan memanfaatkan struktur internal partai sekaligus platform digital terbuka sebagai saluran masuk keanggotaan. Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa PAN Kabupaten Jember mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui rekrutmen modern berbasis teknologi informasi.

PAN Kabupaten Jember membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat luas tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, maupun keorganisasian tertentu. Hal ini sesuai dengan dorongan inklusivitas yang termuat dalam UU No. 2 tahun 2011. Sikap keterbukaan partai terhadap masyarakat umum menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan proses rekrutmen kader PAN Kabupaten Jember. Walaupun tidak ada jadwal atau program kerja khusus, partai tetap secara aktif melakukan kunjungan komunitas pemuda, lembaga agama, kelompok marjinal guna mensosialisasikan mengenai pentingnya keikutsertaan politik melalui kepartaian. Namun berdasarkan hasil wawancara menunjukkan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa PAN merupakan partai yang lebih condong ke salah satu golongan yakni Muhammadiyah, hal ini memunculkan persepsi eksklusivitas digolongan non-Muhammadiyah. Persoalan ini menjadi salah satu penghambat yang dijumpai dalam usaha rekrutmen kader yang lebih luas dan merata. Sedangkan tujuan rekrutmen politik salah satunya adalah melahirkan kader yang berasal dari beragam lapisan sosial, sebagaimana dijabarkan oleh (Kartono, 1994) bahwa rekrutmen kader politik bukanlah persoalan menarik anggota sebanyak-banyaknya saja, melainkan juga tentang memilah individu yang mempunyai potensi kepemimpinan, integritas dan berdedikasi tinggi terhadap tujuan organisasi.

Berdasarkan sudut pandang teori yang dijabarkan oleh Kartono, implementasi PAN Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan kader yang memadai secara kepemimpinan. Penulis menemukan bahwa pendidikan atau pelatihan politik yang berkesinambungan belum dijalankan secara maksimal. Sedangkan Kartono berpendapat bahwa proses rekrutmen yang ideal harus memenuhi tiga tahap penting yakni seleksi, pembinaan, serta pengembangan kepemimpinan. Fakta yang ditemui di lapangan, PAN Kabupaten Jember nampaknya masih fokus terhadap proses seleksi awal utamanya ketika mendekati momentum pemilu, sementara pembinaan dan penguatan kapasitas kader belum sepenuhnya dijalankan dengan konsisten sehingga menunjukkan bahwa orientasi dalam jangka panjang pembangunan partai terhadap sumber daya manusianya belum sepenuhnya terstruktur dengan baik.

Temuan berikutnya di lapangan juga menunjukkan adanya pola dukungan informal yang mengarah kepada kader maupun simpatisan tertentu sebagai bagian dari strategi memperkuat hubungan internal serta memperluas jaringan partai. Walaupun secara normatif tidak melanggar aturan yang sedang berjalan, praktik demikian tetap perlu dikaji dari sudut pandang etika politik serta efektivitas strategi kelembagaan. Kerangka partai politik modern yang menjunjung prinsip meritokrasi harus menjalankan proses rekrutmen yang idealnya didasarkan pada kompetensi, loyalitas, serta komitmen terhadap visi dan perjuangan partai. Oleh karena itu, pendekatan yang berdampak untuk mengaburkan objektivitas dalam kaderisasi sebaiknya ditelaah lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pembinaan politik yang berkelanjutan.

Mengacu dari keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAN Kabupaten Jember sudah memiliki inisiatif untuk menjalankan proses rekrutmen kader secara terbuka, baik melalui media digital maupun dengan pendekatan secara langsung. Namun, impelementasi dari proses pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beragam faktor seperti pelatihan sistematis yang minim, belum sepenuhnya persepsi publik menganggap netral, serta ketidakteraturan proses kaderisasi pemimpin. Oleh sebab itu, guna mewujudkan partai politik yang kuat dan berintegritas, maka PAN Kabupaten Jember perlu menata ulang strategi dari kaderisasi yang bukan hanya sifatnya administratif belaka melainkan juga secara substantif serta orientasinya terhadap proses pengembangan dalam jangka waktu lama.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil kajian dan pembahasan mengenai strategi rekrutmen politik oleh DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa partai ini telah mengimplementasikan pendekatan berbasis digital melalui pemanfaatan aplikasi SimPAN. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menjaring kader secara daring sekaligus menciptakan transparansi proses rekrutmen kepada publik. Pemanfaatan teknologi ini dipadukan dengan kegiatan edukasi politik sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan inklusivitas dalam proses perekrutan anggota.

Inovasi digital yang diterapkan PAN Kabupaten Jember diperkuat oleh dukungan struktur organisasi dan kesiapan para pengurus partai dalam menerima partisipasi dari individu yang berasal dari berbagai latar belakang sosial. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, tetapi juga menjadi cerminan respons partai terhadap tuntutan demokratisasi dalam tata kelola politik di tingkat lokal.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Salah satu hambatan utama terletak pada persepsi publik yang cenderung mengidentikkan PAN dengan organisasi tertentu, khususnya Muhammadiyah. Persepsi ini berpotensi mengurangi minat masyarakat dari luar kelompok tersebut untuk bergabung, sehingga dapat menghambat terciptanya keanggotaan yang lebih beragam dan inklusif.

Dari aspek normatif, PAN Kabupaten Jember telah menjalankan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya terkait prinsip keterbukaan dan pelaksanaan pendidikan politik. Kepatuhan terhadap aspek prosedural ini menunjukkan kesesuaian dengan kerangka hukum nasional yang mengatur fungsi dan peran partai politik dalam sistem demokrasi.

Kendati demikian, implementasi undang-undang tersebut masih memerlukan penguatan di beberapa sektor penting. Aspek meritokrasi dalam proses rekrutmen kader perlu diperjelas agar seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan kualitas dan kapasitas individu. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan partai, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kader, juga perlu ditingkatkan. Selain itu, keberlanjutan sistem kaderisasi harus dibangun di atas prinsip tanggung jawab dan integritas politik guna menjamin bahwa kader yang dihasilkan tidak hanya loyal secara administratif, tetapi juga memiliki kompetensi dan komitmen ideologis yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah disampaikan, maka beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

- a. Bagi DPD PAN Kabupaten Jember, hasil penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi dalam rangka penguatan rekrutmen kaderisasi berkelanjutan, peningkatan pendidikan politik masyarakat, dan pengembangan teknologi secara maksimal. PAN Kabupaten Jember disarankan untuk menyusun program pelatihan kader secara sistematis dan berjenjang, berbasis modul pembinaan serta indikator evaluasi yang jelas dan terukur.
- b. PAN Kabupaten Jember juga diharapkan untuk memperkuat implementasi dari prinsip meritokrasi dan transparansi dalam setiap tahapan saat rekrutmen anggota maupun seleksi kader. Tahapan seleksi yang dijalankan hendaknya mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta rekam jejak kontribusi kader secara objektif. Selain itu, PAN perlu membuka akses informasi rekrutmen secara luas kepada publik untuk membangun transparansi masyarakat serta mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.
- c. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam mengkaji perekrutan politik partai di tingkat lokal. Penelitian lanjutan disarankan agar bisa melakukan eksplorasi kasus serupa pada partai politik lain, baik di daerah yang berbeda maupun dalam konteks pemilihan legislatif atau eksekutif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, F. dan A. W. Anggraeni. 2019. *Semantik: Konsep Dan Contoh Analisis*. Jember: Pustaka Abadi.
- Giawa, A. dan T. Daya Rini. 2017. Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik pada Pileg 2014 (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPW Partai Nasdem DIY). *JBTI : Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*. 8(2): 161–168.
- Kartono, K. 1994. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khamim, A. B. M. dan M. F. Sabri. 2019. Konglomerasi Media dan Partai Politik: Membaca Relasi MNC Group dengan Partai Perindo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. 10(2):112.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 2018. *Qualitative Data Analysis Second Edition*. India: SAGE Publication. CEUR Workshop Proceedings.
- Nasution, A. G. J. 2020. *Metodologi Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pramasta Pustaka Ilmu.
- Nuraini, Riadi, A., Umanailo, M. C. B., Rudsi, M., Badu, T. K., Suryani, S., & Hentihu, V. R. 2019. Political Policy for the Development of Education. *International Journal of Scientific & Technology Research*.
- Syamsiyatun, S. 2016. *Ideologi Gender Dan Politik Kekuatan Agama di Indonesia Kontemporer*. Seri Buku.
- Tompodung, M. C., A. B. Tumanduk, dan P. Jones. 2022. Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1(69):5–24.